

RENCANA KERJA

2026

**DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA**





**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan rencana kerja perangkat daerah dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang selaras dengan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan panduan dan arahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun yang berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun secara teknokratis.
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact).

16. Penganggaran berbasis Program adalah konsep pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, yang mendukung prioritas nasional dan provinsi, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

BAB II

JANGKA WAKTU RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta mengacu prinsip penganggaran berbasis program, berbasis hasil evaluasi capaian kinerja terhadap tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2026 serta mendukung pencapaian Tujuan RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, pagu anggaran yang dibutuhkan serta sumber pendanaannya baik berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber lainnya.

BAB V

PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

JANTANI ALI

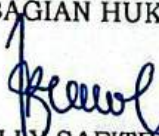
Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 8 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


SRI ELIY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

KATA PENGANTAR

Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 kembali menyusun Rencana Kerja Tahunan yang disusun dengan mempedomani Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026 dan merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 memuat Program-program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan. Nomenklatur Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 telah mengacu kepada nomenklatur program, kegiatan dan sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana

Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang lebih baik lagi untuk dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan upaya kita bersama untuk mencapai Kabupaten Bangka yang lebih nyaman untuk semua. Aamin.

Sungailiat, 8 Agustus 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. I. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19670504 199403 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum 	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2024-2026	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	44
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	51
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	55
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	72
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	73
3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	73
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinakerperindag	75
3.3 Program dan Kegiatan 	76
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	82
BAB V PENUTUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Tabel Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 11
Tabel 2.2	Tabel Realisasi Kinerja dan Keuangan PD Per Program Tahun 2024 11
Tabel 2.3	Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 14
Tabel 2.4	Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2024 (Tahun Berjalan) 15
Tabel 2.5	Tabel Target dan Capaian Tahun 2024 35
Tabel 2.6	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan PD 46
Tabel 2.7	Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 56
Tabel 2.8	Tabel Usulan Program dan Kegiatan dan Pemangku Kepentingan Tahun 2026 71
Tabel 3.1	Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD 76
Tabel 4.1	Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 83

BAB I PENDAHULUAN

1.1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Penyusunan forum Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan penetapan Renja.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026. Sebagai dokumen rencana tahunan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026, dilaksanakan dengan

Renja Dinakerperindag 2026

mengacu kepada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinakerperindag Tahun 2026 sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinakerperindag Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 6 seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

32. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
33. Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 41);
34. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 14).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2026 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 Lingkup Dinakerperindag Kabupaten Bangka.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika penyusunan Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2024-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinakerperindag
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 2024-2026

Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka adalah penjabaran perencanaan tahunan data kinerja rencana strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinkerperindag ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinakerperindag selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitas dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator Kinerja. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan Penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada Tahun 2024 Anggaran Belanja Dinakerperindag Kabupaten Bangka sebesar Rp. 27.484.465.476,00 dengan 1 (satu) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 2 (dua) Urusan Pemerintahan Pilihan, mencakup 7 (tujuh) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 21 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi keuangan sebesar 26.317.665.362 atau 95,75 persen.

Pengukuran persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{c} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{c} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja	Realisasi	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST	ST
76 % ≤ 90% ²	Tinggi	T	T
66% ≤ 75%	Sedang	S	S
51% ≤ 65%	Rendah	R	R
≤ 50%	Sangat Rendah	SR	SR

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program Tahun 2024

No	Program	Realisasi (%)			
		Kinerja	Kategori *)	Persentase Capaian Keuangan	Kategori *)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	ST	96,64	ST
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	80%	T	86,92%	T
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100%	ST	96,93%	ST
4.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1616%	ST	95,27%	ST
5.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100%	ST	95,51%	ST
6	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100%	ST	98,78%	ST
7.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0%	SR	97,87%	ST

Dari tabel diatas menunjukkan skala derajat kinerja yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 96,64% dengan Kategori Sangat Tinggi, ini di dukung oleh kegiatan : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja untuk skala kinerjanya 80% dengan kategori Tinggi dengan Realisasi Keuangan 86,92% dengan Kategori Tinggi, dengan kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
2. Program Hubungan Industrial untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 96,93% dengan Kategori Sangat Tinggi, ini di dukung oleh kegiatan : Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Pengesahan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten /Kota, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri untuk skala kinerjanya 1616% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 95,27% dengan Kategori Sangat Tinggi, ini di dukung oleh kegiatan : Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 95,51% dengan Kategori Sangat Tinggi, dengan kegiatan : Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
5. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk skala kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Tinggi dengan Realisasi Keuangan 98,78% dengan Kategori Sangat Tinggi, dengan kegiatan : Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen untuk skala kinerjanya 0% dengan kategori Sangat Rendah dengan Realisasi Keuangan 97,87% dengan Kategori Sangat Tinggi, dengan kegiatan : Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan,

Dan Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Rp. 4.494.825.000,00 dengan realisasi Rp. 4.897.465.800,00 atau 108,96 persen, dan untuk PAD yang dikelola Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka telah melebihi dari target yang ditetapkan, dan bisa dilihat pada tabel 2.3 rincian anggaran dan realisasi Pendapan Asli Daerah Tahun 2024.

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	PENDAPATAN	4.494.825.000,00	4.897.465.800,00	108,96
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.069.752.000,00	1.102.745.000,00	103,08
2.	Retribusi Pasar Grosir	1.482.518.000,00	1.635.091.000,00	110,29
3.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.792.555.000,00	1.892.031.000,00	105,55
4.	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	150.000.000,00	267.598.800,00	178,40

Sementara itu pencapaian atas pelaksanaan Tahun Anggaran Pada Tahun 2025 Anggaran Belanja Dinakerperindag Kabupaten Bangka sebesar Rp. 13.559.019.694,00 dengan 1 (satu) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 2 (dua) Urusan Pemerintahan Pilihan, mencakup 7 (Tujuh) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian kinerja fisiknya.

Secara umum capaian kinerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2024 ada yang sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinakerperindag 2024-2026.

Selanjutnya capaian evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Bangka

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD (n-2) Tahun 2024	Realisasi Renja PD (n-2) Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)	25,31	-	25,31	25,12	99,25	25,59	50,71	2,00
		Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	11,08	-	11,00	11,25	102,27	11,12	22,37	2,02
		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah (Indeks)	64,25	-	-	-	-	64,55	-	-

Renja Dinakerperindag 2026

		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Indeks)	3	-	3,00	3,00	100,00	4,00	7,00	2,33
		Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	100	-	90,00	90,00	100,00	100,00	190,00	1,90
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	2,00
		Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	2,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	13	-	13,00	19,00	146,15	13,00	32,00	2,46
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14	-	24,00	24,00	100,00	14,00	38,00	2,71
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang Disusun Sesuai Standar (%)	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	2,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang 30 laki-laki dan 31 perempuan)	49	-	54,00	54,00	100,00	54,00	108,00	2,20
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	-	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	2,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	42	-	42,00	42,00	100,00	42,00	84,00	2,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap (%)	100	-	-	-	-	100,00	100,00	1,00

		Persentase Pegawai yang mendapatkan Layanan Kepegawaian (%)	100	-	-	-	-	100,00	100,00	1,00
		Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (%)	50	-	-	-	-	50,00	50,00	1,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	-	-	-	-	1,00	1,00	0,50
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	11	-	-	-	-	11,00	11,00	1,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (orang 15 laki-laki dan 15 Perempuan)	10	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di perangkat daerah (%)	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	2,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	-	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	2,00
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Laporan)	12	-	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	2,00
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	12	-	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	2,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan aset perangkat daerah (%)	5,8	-	-	-	-	6,00	6,00	1,03
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (Unit)	0	-	-	-	-	1,00	1,00	-

	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Paket)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	30	-	-	-	-	20,00	20,00	0,67
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah (%)	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	2,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	-	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	2,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik yang disediakan (Laporan)	12	-	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	2,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12	-	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	2,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah yng dipelihara (%)	65	-	65,00	65,00	100,00	70,00	135,00	2,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) Mobil	4	-	4,00	4,00	100,00	4,00	8,00	2,00
		Motor	14	-	-	-	-	13,00	13,00	0,93
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	30	-	30,00	30,00	100,00	30,00	60,00	2,00

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD (%)	66	-	-	-	-	77,00	77,00	1,17
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTKD yang disusun (Dokumen)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro (orang)	20	-	-	-	-	25,00	25,00	1,25
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang kompeten (%)	53,3	-	53,30	42,58	79,89	56,00	98,58	1,85
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan (%)	50	-	50,00	29,03	58,06	53,85	82,88	1,66
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	60	-	20,00	20,00	100,00	70,00	90,00	1,50
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang dibina (%)	100	-	-	-	-	100,00	100,00	1,00
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina (Lembaga)	10	-	-	-	-	15,00	15,00	1,50

	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas (%)	10	-	-	-	-	15,00	15,00	1,50
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	10	-	-	-	-	15,00	15,00	1,50
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	83	-	-	-	-	92,00	92,00	1,11
	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL (%)	58,3	-	-	-	-	57,60	57,60	0,99
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	70	-	-	-	-	75,00	75,00	1,07
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	10	-	-	-	-	15,00	15,00	1,50
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencari (%)	25	-	-	-	-	29,00	29,00	1,16
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karir Hub) (Pencaker dan Pemberi Kerja)	50	-	-	-	-	60,00	60,00	1,20
			5	-	-	-	-	10,00	10,00	2,00
	Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja (Orang)	20	-	-	-	-	30,00	30,00	1,50
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan (%)	46,5	-	46,50	46,50	100,00	47,77	94,27	2,03

	Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (%)	86,9	-	86,90	86,90	100,00	10,00	96,90	1,12
	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online (Perusahaan)	10	-	-	-	-	10,00	10,00	1,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartiti) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	2,00
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	62,5	-	62,50	62,50	100,00	62,50	125,00	2,00
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	12	-	16,00	16,00	100,00	16,00	32,00	2,67
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi (Asosiasi dan SP)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
			6	-	-	-	-	6,00	6,00	1,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Lembaga)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00

	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan (%)	70	-	-	-	-	75,00	75,00	1,07
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang (%)	70	-	-	-	-	75,00	75,00	1,07
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan Minuman Beralkohol (%)	25	-	-	-	-	30,00	30,00	1,20
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Dokumen)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya (%)	40	-	-	-	-	40,00	40,00	1,00

	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Laporan	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi (%)	70	-	70,00	70,00	100,00	70,00	140,00	2,00
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	62,50	-	62,50	62,50	100,00	75,00	137,50	2,20
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	-	1,00	1,00	100,00	1,00	2,00	2,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan (%)	100	-	-	-	-	100,00	100,00	1,00
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan (Dokumen)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar (%)	90	-	90,00	102,86	114,29	90,00	192,86	2,14
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	85	-	85,00	85,00	100,00	90,00	175,00	2,06

	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	-	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	2,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	5	-	7,00	8,00	114,29	5,00	13,00	2,60
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida (%)	70	-	-	-	-	75,00	75,00	1,07
	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi (Laporan)	12	-	-	-	-	12,00	12,00	1,00
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90% (Laporan)	12	-	-	-	-	12,00	12,00	1,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang (%)	100	-	-	-	-	100,00	100,00	1,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan (%)	100	-	-	-	-	100,00	100,00	1,00
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	7	-	-	-	-	7,00	7,00	1,00

	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Promosi terhadap Pelaku usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri (%)	75	-	-	-	-	75,00	75,00	1,00
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)	75	-	-	-	-	75,00	75,00	1,00
	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi (UMKM)	50	-	-	-	-	50,00	50,00	1,00
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang yang dibutuhkan (%)	31,04	-	31,04	31,04	100,00	39,29	70,33	2,27
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang (%)	71,51	-	71,51	130,64	182,69	85,81	216,45	3,03
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat ukur, alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	1250	-	1.250,00	1.630,00	130,40	1.500,00	3.130,00	2,50
	Sub Kegiatan Pengawasan /Penyuluhan metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina (Orang)	500	-	500,00	1.530,00	306,00	500,00	2.030,00	4,06
	URUSAN PEMERINATAHAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM (%)	0,5	-	0,50	8,08	1.616,00	0,70	8,78	17,56

	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (%)	20	-	20,00	20,00	100,00	25,00	45,00	2,25
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri (Dokumen)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri. (Dokumen)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat.	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat. (Dokumen)	1	-	16,00	16,00	100,00	1,00	17,00	17,00
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SIINAS dan OSS (%)	25	-	-	-	-	30,00	30,00	1,20
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Pemenuhan komitmen Izin Usaha industri (%)	20	-	-	-	-	30,00	30,00	1,50

	Sub Kegiatan Fasilitas verifikasi kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis Fasilitas Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten /Kota (Dokumen)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS (%)	10	-	-	-	-	15,00	15,00	1,50
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS (%)	2	-	-	-	-	4,00	4,00	2,00

	Sub Kegiatan Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) (Dokumen)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan industri Lingkup Kabupaten/kota dalam penyampaian Data Ke SIINAS (Dokumen)	1	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00

Terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2024, sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan :

Pada Tahun 2024 Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja Hasil/Keluaran sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Berdasarkan Unit Kompetensi
2. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan :

Tahun 2024 kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka sebanyak Program 8 (delapan), Kegiatan 13 (Tiga belas), Sub Kegiatan 22 (dua puluh dua) dan dapat mencapai 100%, dan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan triwulan IV antara lain sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

2. Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klasater Kompetensi.

Program Hubungan Industrial terdiri dari :

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana hubungan industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja, dan penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Bangka;

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri dari :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdiri dari :

1. Kegiatan Pengendalian Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen terdiri dari :

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, tera Ulang dan Pengawasan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, Tera Ulang;
 - Sub Kegiatan Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri dari :

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

3. Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja

Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (target 13 Dokumen menjadi 19 Dokumen)
- Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Kegiatan Pengendalian Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (target 7 Laporan menjadi 8 Laporan)

- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera Ulang dan Pengawasan (Unit) target dari 1.250 Unit menjadi 1.630 unit
Sub Kegiatan Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal (Orang) target dari 500 orang menjadi 1.530 orang
- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (Persen) target dari 0,5 menjadi 8,08

4. **Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya/~~Melebihi~~ Target Kinerja**

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya/~~melebihi~~ target kinerja realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Terdapat beberapa program yang ditunda pelaksanaannya Tahun 2024 karena keterbatasan anggaran di Kabupaten Bangka sehingga tidak dapat memenuhi target program dan kegiatan yang akan dicapai. Selanjutnya capaian atas kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinakerperindag tahun 2026 dan melakukan upaya-upaya seperti anggaran kedepan perlu dipacu target yang tidak tercapai sehingga diakhir renstra target bisa tercapai dengan mengupayakan jemput bola penggunaan pendanaan dari APBN, DAK, Dana Insentif Fiskal sehingga tidak membebani APBD Kabupaten Bangka.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab ~~tidak tercapainya~~ /melebihi target kinerja realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Aparatur Dinakerperindag yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait;

3. Adanya anggaran yang tersedia sehingga bisa mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disepakati didalam dokumen perencanaan.

Berdasarkan target capaian program sesuai dengan Renstra 2024-2026 secara keseluruhan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tabel Target dan Capaian Tahun 2024

N o.	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja
		Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	Nilai			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	BB (76,26)	BB (75,75)	99,33
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Kinerja sesuai standar	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	25,31	25,12	99,25
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		11,08	11,25	101,53
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD</i>	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>
			<i>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</i>	<i>Persen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	13	19	146,15

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	24	100,00
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Persen	0	0	100,00
	Kegiatan Admisntrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	100	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	54	54	100,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Laporan	42	42	100,00

		Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks	3	3	100,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	100,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	Persen	100	100	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah layanan Kebersihan Kantor yang tertangani	Laporan	12	12	100,00
		Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam kondisi baik	Persen	90	90	100,00

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	Persen	65	65	100,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan Roda Empat , Kendaraan Roda Dua	4	4	100,00
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30	30	100,00
		Menurunkan Tingkat Pengangguran terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,42	4,91	90,59
		Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	41,50	44,39	106,96
2.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	53,30	42,58	79,89
	Kegiatan Pelaksanaan berdasarkan Unit kompetensi	Meningkatnya Ketrampilan dan Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari kerja yang kompeten	Persen	50,00	29,03	58,06

	Sub Kegiatan proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	20	20	100,00
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	Persen	46,50	46,50	100,00
	<i>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Perusahaan yang mengesahkan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama</i>	<i>Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</i>	<i>Persen</i>	<i>86,90</i>	<i>86,90</i>	<i>100,00</i>
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upa, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai Peserta jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan (20 Perusahaan)	1	1	100,00
	<i>Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota</i>	<i>Terselesainya penyelesaian Kasus Perselisihan HI melalui Perjanjian Bersama</i>	<i>Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama</i>	<i>Persen</i>	<i>62,50</i>	<i>62,50</i>	<i>100,00</i>

	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial , Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	16	16	100,00
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	7,42	0,97	13,07
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,15	13,09	99,54
4.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana yang Distribusi direvitalisasi	Persen	70	70	100,00
	<i>Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Persen</i>	<i>62,50</i>	<i>62,50</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1,00	1	100,00

5.	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menstabilkan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	Persen	90,00	102,86	114,29
	<i>Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota</i>	<i>Meningkatnya Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota</i>	<i>Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting</i>	<i>Persen</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>100,00</i>
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Tersedianya laporan Pemantauan harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Baran Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100,00
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	7	8	114,29
6.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Standarisasi Perlindungan Konsumen	Persentase Alat standar tera/tera ulang	Persen	31,04	0	0,00
	<i>Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</i>	<i>Meningkatnya UTPP yang ditera/tera Ulang</i>	<i>Persentase UTPP yang ditera/tera ulang</i>	<i>Persen</i>	<i>71,51</i>	<i>130,64</i>	<i>182,69</i>

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat ukur, Alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan terhadap Ketentuan yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	1250	1630	130,40
	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	500	1530	306,00
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor IKM	Persentase Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan	Persen	12,39	-6,73	54,32
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	25,28	24,24	95,89
7.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk pengembangan Produk IKM	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk pengembangan Produk IKM	Persen	0,5	8,08	1616,00
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelaksanaan Rencana Pembangunan industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persen	20	20	100,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Indutri dan peran Serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	16	16	100,00

5. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra PD

implikasi yang timbul dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka pada tahun 2024 capaiannya Sangat tinggi dan untuk tahun 2025 dan 2026 Dinas tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra 2024-2026, dengan didukung anggaran dan SDM yang akuntabel dalam pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

3. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan uraian pada sub 2.1.3 Kinerja Dinakerperindag sampai dengan Akhir Tahun 2024 dapat mencapai target dan ada juga yang melebihi target dan untuk kedepannya agar Dinakerperindag dapat :

1. Melakukan Koordinasi dan pendekatan dengan Tim TAPD untuk penambahan anggaran karena Dinakerperindag dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ada 3 (tiga) urusan yang harus dilaksanakan pada 3 (Tiga) Kementerian yang harus dilaksanakan agar program, kegiatan dan sub kegiatan tercapai;
2. Melakukan Koordinasi dan pendekatan dengan Dinas Perindag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan anggaran atau bantuan peralatan untuk Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka;
3. Melakukan Koordinasi dan pendekatan dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan agar Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dapat melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan

dibiayai oleh dana dari APBN, DAK Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Fiskal dan lain-lain.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dalam penyelenggara pemerintahan daerah telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai fungsi dan kewenangannya.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang secara organisasional melaksanakan Tugas dan Fungsinya pada bulan Januari tahun 2024 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka NOMOR : 188.45/ 014 /DINAKERPERINDAG/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tahun 2025 Dinakerperindag Kabupaten Bangka menyelenggarakan 3 (tiga) Urusan

yaitu 1 (satu) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 2 (dua) Urusan Pemerintahan Pilihan.

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan Dinakerperindag sampai tahun 2024 dapat diukur secara keseluruhan, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN KETENAGAKERJAAN									
	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah			41,50	68,19	74,26	44,39	44,50	74,26	
1.	IKK OUTCOME									
	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja		Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD dibagi Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten /Kota	1,70	1,73	1,75	60	0	60	
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi Jumlah Tenaga kerja Keseluruhan dikali 100%	4,45	4,47	4,50	2,10	2,15	2,20	
	IKK OUTCOME									
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) dibagi Jumlah Tenaga Kerja dikali 100%	72,02	72,30	72,45	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IKK OUTCOME									
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dibagi Jumlah Perusahaan pada tahun n Jumlah dikali 100	26,76	26,78	27,00	29,01	26,78	27,00	
	IKK OUTCOME									
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar daerah) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari yang terdaftar dikali 100%	16,20	16,55	16,63	50,97	60,00	62,00	
	URUSAN PERINDUSTRIAN									
	Persentase Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB			25,28	24,47	24,62	24,24	24,47	24,62	
	IKK OUTCOME									
1	Pertambahan Jumlah industri Kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		Jumlah Industri Kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri Kecil dan menengah tahun n-1 dibagi Jumlah Industri Kecil dan menengah tahun n-1 dikali 100%	21,40	23,90	26,40	10,63	11,66	12,50	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IKK OUTCOME									
2.	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan RPIP		Persentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	97,81	98,96	99,71	52,50	52,50	52,50	-
	IKK OUTCOME									
3.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	7,66	7,77	7,98	0	0	0	
	IKK OUTCOME									
4.	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IKK OUTCOME									
6.	Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini			100	100	100	100	100	100	
	URUSAN PERDAGANGAN									
	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB			13,15	12,54	12,69	13,09	13,12	13,15	
	IKK OUTCOME									
1.	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		Jumlah pelaku Usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan dibagi jumlah pelaku susha di wilayah kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	
	IKK OUTCOME									
2.	Persentase kinerja Realisasi pupuk		Realisasi dibagi RDKK dikali 100%	32,37	34,87	37,37	80,83	81,00	82,00	
	IKK OUTCOME									
3.	Persentase alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		Jumlah UTTP yang bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/Kota dikali 100%	89,48	92,11	97,87	93,84	92,11	97,87	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN SEKRETARIAT									
	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah			76,26	74,75	74,75	75,75	74,75	74,75	
1.	Nilai Kinerja Perencanaan PD		Nilai Komponen perencanaan kinerja pada LHE AKIP Perangkat Daerah	25,31	25,59	25,62	25,12	25,59	25,62	
2.	Nilai Kinerja pelaporan PD		Nilai Komponen pelaporan kinerja pada LHE AKIP Perangkat Daerah	11,08	11,12	11,17	11,25	11,27	11,30	
3.	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan PD dalam LHP BPK RI		Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan BPK dalam LHP BPK-RI x100 %	0	0	0	0	0	0	
4.	Indeks Profesionalisme ASN PD		Hasil perhitungan Indeks Profesiona ASN Perangkat daerah oleh BKPSDMD	64,25	64,55	64,65	64,25	64,55	64,65	
5.	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal PD		Hasil survey internal terhadap pelayanan Bidang Sekretariat Perangkat Daerah (dari 1 sampai 4)	3	4	4	3	4	4	
6.	Persentase BMD PD dalam Kondisi Baik		Jumlah Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh barang milik daerah dalam inventaris Perangkat Daerah X 100%	90	100	100	90	100	100	

Berdasarkan tabel diatas Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka tahun 2024 dapat dikategorikan berhasil/baik meskipun dengan anggaran terbatas.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian serta perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pembinaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.

2. Permasalahan dan Hambatan

Sedangkan terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, antara lain :

1. Keterbatasan anggaran dan SDM lingkup Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka;

2. Belum tersedianya Gedung BLK (Balai Latihan Kerja) di Kabupaten Bangka;
3. Kurang harmonisnya Hubungan industrial ditempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;
4. Masih Belum optimalnya tata kelola industri pengolahan;
5. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas;
6. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri;
7. Masih belum optimalnya pengawasan barang dan jasa guna peningkatan perlindungan konsumen;
8. Belum maksimalnya sarana perdagangan yang memadai untuk menunjang perekonomian masyarakat;
9. Adanya kelangkaan pasokan beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan;
10. Lingkup layanan pengujian dan sertifikat yang masih sangat terbatas dikarenakan ketersediaan peralatan untuk pengembangan layanan terstandarisasi sangat terbatas;
11. Adanya kenaikan harga beberapa barang kebutuhan pokok dan barang penting ditengah meningkatnya jumlah permintaan.

3. Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah dan terhadap capaian program nasional

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi selama tahun 2025, maka strategi pada tahun 2026 yang berupa rekomendasi dan catatan untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2026 sebagai berikut :

- a. Adanya Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka;
- b. Adanya SDM yang akuntabel;
- c. Meningkatkan pelatihan calon pekerja berbasis kompetensi peluang usaha/pekerjaan yang dibutuhkan;
- d. Meningkatkan ketersediaan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media yang dapat diakses dengan mudah;
- e. Menciptakan iklim usaha yang kondusif anatar pekerja dan Perusahaan;
- f. Meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan agar patuh untuk menyampaikan data dan informasi industri melalui SIINAS;
- g. Meningkatkan pelatihan dan bimbingan teknis kepada IKM (Sertifikat Halal, HAACP dll) untuk meningkatkan Produk yang dihasilkan;
- h. Meningkatkan pelaksanaan operasi Pasar dan operasi Pasar bersubsidi di Kabupaten Bangka untuk mengatasi inflasi dan monitoring pemantauan harga dan stok barang dan barang strategis lainnya;
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan yang ada di Kabupaten Bangka.

Berdasarkan uraian diatas maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka dapat melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat mendukung pelaksanaan program nasional sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

4. Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinakerperindag ke depan antara lain :

- Pentingnya peran Dinakerperindag Kabupaten Bangka yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
- Menyiapkan tenaga terampil sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- Menyiapkan informasi lapangan kerja dengan bekerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka untuk melakukan kegiatan Job Fair dan memberikan pelatihan kepada Pencaker;
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- Tersedianya peraturan yang mendukung kegiatan perencanaan dan evaluasi;
- Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan penganggaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.

5. Formulasi isu-isu penting

Sedangkan dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka terdapat isu-isu yang penting yaitu :

1. Rendahnya Kompetensi dan Kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja;
2. Kurang harmonisnya Hubungan industrial ditempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;
3. Belum optimalnya tata kelola industri pengolahan;
4. Belum optimalnya pengembangan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukkan industri;

5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan industri dalam penyampaian data dan informasi industri;
6. Masih rendahnya kepatuhan Perusahaan Industri/Pelaku Usaha dalam kewajiban memiliki akun SIINas;
7. Masih belum optimalnya pengawasan barang dan jasa guna peningkatan perlindungan konsumen;
8. Belum maksimalnya sarana perdagangan yang memadai untuk menunjang perekonomian Masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinakerperindag. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Bangka

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka

No	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Analisis Hasil Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.246.134.100,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.246.134.100,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				9.626.134.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				9.626.134.100	
			Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	25,62	50.000.000			Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	25,62	50.000.000	
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,17	40.000.000			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,17	40.000.000	
			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	6.525.000.000			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%	6.525.000.000	
			Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	64,65	128.000.000			Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	64,65	128.000.000	
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4	1.763.134.100			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	4	1.763.134.100	
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100	1.120.000.000			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100	1.120.000.000	

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	50.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	50.000.000	
			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	40.000.000			Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	40.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	50.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	40.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	40.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	6.525.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	6.525.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang (30 orang Laki-laki & 31 orang Perempuan)	6.505.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang (30 orang Laki-laki & 31 orang Perempuan)	6.505.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	42 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	42 Dokumen	10.000.000	

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap	100	65.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap	100	65.000.000	
			Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100	3.000.000			Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100	3.000.000	
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50	60.000.000			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	65.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	65.000.000	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	3.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	3.000.000	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diluar Kab. Bangka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang (5 Laki-laki dan 5 Perempuan)	60.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diluar Kab. Bangka	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang (5 Laki-laki dan 5 Perempuan)	60.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di perangkat daerah	100	383.134.100	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di perangkat daerah	100	383.134.100	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka dan Diluar Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	373.134.100	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka dan Diluar Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	373.134.100	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	5.000.000	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	100	1.380.000.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	100	1.380.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.100.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	130.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kab. Bangka	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	130.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	150.000.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penambahan aset perangkat daerah	6,20	735.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penambahan aset perangkat daerah	6,20	735.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	235.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	235.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bangka	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	50.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Bangka	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	50.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Unit	50.000.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	400.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	400.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik daerah yng dipelihara	75	385.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik daerah yng dipelihara	75	385.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Mobil & 13 Motor	300.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Mobil & 13 Motor	300.000.000	

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	35.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	35.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				20.000.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				20.000.000	
			Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	88	20.000.000			Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	88	20.000.000	
	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen RTKD yang disusun	1	20.000.000	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen RTKD yang disusun	1	20.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	10.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Bangka	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	30 Orang	10.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab. Bangka	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	30 Orang	10.000.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				270.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				270.000.000	
			Persentase Pencari Kerja yang kompeten	60	270.000.000			Persentase Pencari Kerja yang kompeten	60	270.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan	57,14	230.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan	57,14	230.000.000	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bangka	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 orang	180.000.000	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bangka	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 orang	180.000.000	

	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 unit	50.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPKS yang dibina	100	20.000.000	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Persentase LPKS yang dibina	100	20.000.000	
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bangka	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	20 Lembaga	20.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Bangka	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	20 Lembaga	20.000.000	
	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas	20	20.000.000	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas	20	20.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Bangka	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	20.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab. Bangka	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	20.000.000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				150.000.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				150.000.000	
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	100	150.000.000			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	100	150.000.000	
	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL	57,14	60.000.000	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AK/AKL	57,14	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Kab. Bangka	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	80 orang	30.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Kab. Bangka	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	80 orang	30.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Bangka	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 orang	30.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Bangka	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 orang	30.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker	28	90.000.000	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencaker	28	90.000.000	
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bangka	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karir Hub)	70 Pencaker dan 15 pemberi Kerja	60.000.000	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bangka	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (karir Hub)	70 Pencaker dan 15 pemberi Kerja	60.000.000	

	Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Kab. Bangka	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	40 Orang	30.000.000	Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Kab. Bangka	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	40 Orang	30.000.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				180.000.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				180.000.000	
			Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	49,04	180.000.000			Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	49,04	180.000.000	
	Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	96,25	60.000.000	Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota		Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	96,25	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Bangka	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	10 Perusahaan	25.000.000	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Bangka	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online	10 Perusahaan	25.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan dan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bangka	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartiti) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan (20 Perusahaan)	35.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan dan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Bangka	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartiti) dan pekerja yang terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan (20 Perusahaan)	35.000.000	
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota		Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	62,5	120.000.000	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota		Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	62,5	120.000.000	

	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Kab. Bangka		16 Perkara	40.000.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Kab. Bangka		16 Perkara	40.000.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bangka	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi & 6 SP	20.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bangka	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi	1 Asosiasi & 6 SP	20.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	60.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	60.000.000	
	URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN					URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN					
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				435.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				435.000.000	
			Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM	0,80	435.000.000			Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM	0,80	435.000.000	
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	30	435.000.000	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	30	435.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri	1 Dokumen	45.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri	1 Dokumen	45.000.000	

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri.	1 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri.	1 Dokumen	30.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat.	Kab. Bangka	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.	1 Dokumen	360.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat.	Kab. Bangka	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat.	1 Dokumen	360.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				40.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				40.000.000	
			Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SIINAS dan OSS	40	40.000.000			Persentase Izin Usaha Industri yang terintegrasi melalui SIINAS dan OSS	40	40.000.000	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota		Persentase Penerbitan Pemenuhan komitmen Izin Usaha industri	40	40.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota		Persentase Penerbitan Pemenuhan komitmen Izin Usaha industri	40	40.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	

	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis Fasilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).	Kab. Bangka	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis Fasilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Sistem Informasi Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).	Kab. Bangka	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	20.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				45.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				45.000.000	
			Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS	20	45.000.000			Persentase Industri yang menyampaikan Informasi Industri melalui SIINAS	20	45.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Informasi untuk industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota		Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS	5	45.000.000	Kegiatan Penyediaan Informasi untuk industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten/Kota		Persentase Kelengkapan data perusahaan industri yang disampaikan melalui SIINAS	5	45.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Industri, data kawasan industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	15.000.000	

	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan industri Lingkup Kabupaten/kota dalam penyampaian Data Ke SIINAS	1 Dokumen	30.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan industri Lingkup Kabupaten/kota dalam penyampaian Data Ke SIINAS	1 Dokumen	30.000.000	
	URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN					URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN					
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				45.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				45.000.000	
			Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan	80	45.000.000			Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin perdagangan	80	45.000.000	
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang	80	20.000.000	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Gudang yang memiliki Tanda Daftar Gudang	80	20.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	20.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Bangka	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	20.000.000	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan Minuman Beralkohol	35	10.000.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase pelaku usaha yang memiliki izin perdagangan Minuman Beralkohol	35	10.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Bangka	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Bangka	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	10.000.000	

	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya	40	15.000.000	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya	40	15.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Jilid Laporan	15.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Bangka	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1 Jilid Laporan	15.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3.180.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				3.180.000.000	
			Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi	70,00	3.180.000.000			Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi	70,00	3.180.000.000	
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	87,5	3.100.000.000	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	87,5	3.100.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	100.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bangka	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	3.000.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bangka	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	3.000.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	80.000.000	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	80.000.000	

	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bangka	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	80.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bangka	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	80.000.000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				160.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				160.000.000	
			Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	100	160.000.000			Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	100	160.000.000	
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	95	90.000.000	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	95	90.000.000	
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan 2 Dokumen	60.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan 2 Dokumen	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5 laporan	30.000.000	
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	80	70.000.000	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida	80	70.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bangka	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	12 laporan	35.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bangka	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	12 laporan	35.000.000	

	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bangka	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12 laporan	35.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Bangka	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12 laporan	35.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				60.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				60.000.000	
			Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang	100	60.000.000			Persentase pelaku usaha yang mengikuti promosi dagang	100	60.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan	100	60.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaku usaha yang mengikuti pameran dagang produk ekspor unggulan	100	60.000.000	
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Kab. Bangka	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	7 Pelaku Usaha	60.000.000	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Kab. Bangka	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	7 Pelaku Usaha	60.000.000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				95.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				95.000.000	
			Persentase Fasilitas Promosi terhadap Pelaku usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri	75	95.000.000			Persentase Fasilitas Promosi terhadap Pelaku usaha yang Menggunakan dan Memasarkan Produk Dalam Negeri	75	95.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	75	95.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	75	95.000.000	

	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	95.000.000	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bangka	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	95.000.000	
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				145.000.000	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				145.000.000	
			Persentase Alat standar tera/tera ulang yang dibutuhkan	43,13	110.000.000			Persentase Alat standar tera/tera ulang yang dibutuhkan	43,13	110.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	94,39	145.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan		Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	94,39	145.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Bangka	Jumlah Alat ukur, alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1650 Unit	110.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Bangka	Jumlah Alat ukur, alat Takar, Alat timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1650 Unit	110.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan metrologi Legal	Kab. Bangka	Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina	500 orang	35.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan metrologi Legal	Kab. Bangka	Jumlah Pelaku Usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina	500 orang	35.000.000	
JUMLAH					14.451.134.100,00					14.451.134.100,00	

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, target, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disediakan dirancangan awal RKPD. Secara umum hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bangka adalah sebagaimana berikut :

1. Tidak terdapat penambahan jumlah program dan kegiatan
2. Tidak terdapat perubahan target kinerja antara hasil analisis kebutuhan perangkat daerah dengan rancangan RKPD
3. Tidak terdapat perbedaan jumlah pagu antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel diatas Pagu Anggaran Hasil Analisis Kebutuhan lebih besar dibandingkan Pagu Rencana Program dan Kegiatan PD tahun 2026 hal ini disebabkan karena :

- Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka sehingga Pagu yang diberikan Bappeda lebih kecil dari Pagu Anggaran Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, dari Pagu Rp. 14.451.134.100,00 menjadi Rp. 13.762.404.989,00

Hasil analisis kebutuhan perangkat daerah selanjutnya akan menjadi pertimbangan dalam penetapan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, target kinerja serta batasan pagu yang akan dituangkan dalam Renja Dinakerperindag tahun 2026 dengan tetap mengacu pada Renstra Dinakerperindag Tahun 2024-2026 dan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja didiskusikan dalam pembahasana forum OPD Kabupaten Bangka. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program dan kegiatan yang ditujukan kepada Dinakerperindag selaku OPD baik dari kelompok masyarakat dan Reses DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Adapun Program dan kegiatan yang diusulkan adalah :

Tabel 2.8					
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026					
Kabupaten Bangka					
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan					
No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Pengadaan Saran Pelatihan Kabupaten/Kota - Pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja)	Kecamatan Sungailiat	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Unit	Ditolak karena keterbatasan anggaran

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Nasional (Asta Cita) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 terdiri dari :

1. Memperkokoh Idiologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manulasi (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri reatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kenyetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi Milineal dan Genersi Z). Dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 :

1. Memperkuat Sistem Pemerintahan yang responsif, andal dan terpercaya;
2. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusi yang berkualitas, Berdaya dan berbudaya.

Sedangkan Prioritas RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah :

1. Penguatan Kapasitas Birokrasi;
2. Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Penguatan Sektor Ekonomi Unggulan, Industri dan Pertanian (Ekonomi Hijau dan biru);
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Prioritas Nasional, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Prioritas RKPD Kabupaten Bangka maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada :

1. **Urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (rutin)**, dengan Prioritas Nasional Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Memperkuat Sistem Pemerintahan yang responsif, Andal dan Terpercaya dan Untuk Prioritas RKPD Kabupaten Bangka Penguatan Kapasitas Birokrasi
2. **Urusan Ketenagakerjaan** dengan Prioritas Nasional Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara

Berkelanjutan; dan Untuk Prioritas RKPD kabupaten Bangka Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial;

3. **Urusan Perindustrian dan Perdagangan** dengan Prioritas Nasional Melanjutkan hilirasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai di dalam negeri, Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Meningkatkan Daya Saing Perekonomian secara Berkelanjutan, dan Untuk Prioritas RKPD Kabupaten Bangka Penguatan Sektor Ekonomi Unggulan, Industri dan Pertanian (Ekonomi Hijau dan biru).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinakerperindag

Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bangka yang tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 serta memperhatikan permasalahan dan tantangan, serta potensi dan peluang pembangunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Bangka, maka tujuan tahun 2024-2026 yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor IKM;
3. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan;
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun sasaran dirumuskan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah;
2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB;

3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- 3 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	4,92
		Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	74,26
2.	Meningkatkan pertumbuhan sektor IKM		Persentase Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan	12,99
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	24,62
3.	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan		Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	8,12
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,69
4.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Informasi Birokrasi Perangkat Daerah	34,37
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	BB (74,75)

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka melaksanakan 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan.

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan ini disusun dengan menyesuaikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003, dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D) dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 43).

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 1. Penyesuaian Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
 2. Penyesuaian terhadap Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 3. Penyesuaian Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003.
 4. Penyesuaian Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan Kegiatan, antara lain meliputi :
 1. Terdapat 8 Program yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahun 2026;
 2. Terdapat 14 kegiatan yang masing-masing mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026;

3. Terdapat 23 Sub Kegiatan yang masing-masing mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026;
4. Total pagu kebutuhan dana/pagu dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Fiskal tahun 2025 sebesar Rp. Rp. 13.762.404.989,00;
5. Total pagu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 4.647.370.000,00
6. Lokasi pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Bangka.

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum**
 1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

2. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

III. Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.

IV. Program Hubungan Industrial

Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten;
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

V. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

VI. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

VII. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

VIII. Program Standarisasi Perlindungan Konsumen

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang;
2. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinakerperindag Kabupaten Bangka disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinakerperindag Kabupaten Bangka direncanakan Tahun Anggaran 2026 ada 8 (Delapan) Program, 14 (Empat belas) Kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) Sub Kegiatan.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan Dinakerperindag Kabupaten Bangka pada Tahun 2026 direncanakan kebutuhan dana/pagu indikatif disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Bangka

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target		Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah (Provinsi/Kabupa ten)						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
						Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan			13.762.404.989,00							11.756.134.100,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.201.009.729,00							11.756.134.100,00			
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			9.201.009.729,00							8.816.134.100,00			
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP- BPK RI Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	25,62 11,17 0% 64,65 4 100	8.976.409.729,00						-	8.571.134.100,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN		

	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100 %	15.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	-	65.000.000,00	
							Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100%									
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	7.475.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	7.525.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 %	7.940.563.206,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	-	6.350.000.000,00	

	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Org(LK 65& 48Pr) Orang/bulan	7.940.563.206,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Sungailiat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		6.350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihanPersentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaianPersentase Pegawai yang menggunakan atribut lengkap	50 %100 %100 %	26.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercayaPenguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag	-	68.000.000,00	
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	16.470.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperindag		3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di perangkat daerah	100 %	163.495.501,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperinda g	-	373.134.100,00	378.134.100,00
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	147.025.501,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperinda g		373.134.100,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	16.470.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperinda g		0,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	100 %	724.611.022,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperinda g	-	1.380.000.000,00	

	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	184.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperinda g		1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	501.352.652,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercayaPengu atan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperinda g		130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.508.370,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperinda g		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang dipelihara	75 %	106.520.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperinda g	-	335.000.000,00	

	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Mobil, 13 motor Unit	91.440.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperinda g		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	15.080.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Memperkuat sistem pemerintahan yang responsif, andal, dan terpercaya Penguatan Kapasitas Birokrasi	ASN Dinakerperinda g		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N
2	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	60.00 %	70.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan	57,14 %	70.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pencari Kerja	-	100.000.000,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi											
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	30 Orang	70.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanju tan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pencari Kerja		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N

3	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	100 %	30.000.000,00					-	0,00			
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencari	28 %	30.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanju tan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pencari Kerja	-	0,00		
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online												
							Jumlah Pencari dan Terdftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	70 dan 15 Orang	30.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanju tanKesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Pencari Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N	
4	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	49.04 %	124.600.000,00						-	145.000.000,00		
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	96.25 %	27.450.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanju tan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Perusahaan	-	35.000.000,00		
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan												
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 Laporan	27.450.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanju tan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Perusahaan		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N	

	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	62.5 %	97.150.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Perusahaan,Pe kerja, Serikat Kerja/Buruh	-	110.000.000,00	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	16 Perkara	38.150.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Perusahaan,Pe kerja, Serikat Kerja/Buruh		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	59.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial	Perusahaan,Pe kerja, Serikat Kerja/Buruh		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.561.395.260,00							2.940.000.000,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.374.895.260,00							2.540.000.000,00	
5	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi	70 %	1.108.028.260,00						-	2.300.000.000,00	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	87.5 %	1.108.028.260,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanju- tan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan	-	2.300.000.000,00	
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	1.108.028.260,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanju- tan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan		2.300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N

6	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	100 %	191.867.000,00						-	160.000.000,00	
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	95 %	191.867.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan	-	160.000.000,00	
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	156.867.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

7	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	43,13%	75.000.000,00						-	80.000.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	65 %	75.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanju- tan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan	-	80.000.000,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang											
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1250 Unit	65.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanju- tan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal											
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500 Orang	10.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanju- tan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	Pelaku Usaha Perdagangan		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGA N

	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.186.500.000,00	3.186.500.000,00						400.000.000,00	
8	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM	0.80 %	3.186.500.000,00						-	400.000.000,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	30 %	3.186.500.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	IKM	-	400.000.000,00	
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	3.186.500.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SENTRA IKM	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan Penguatan sektor ekonomi unggulan industri dan pertanian (Ekonomi Hijau dan Biru)	IKM		400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H								13.762.404.989,00							11.761.134.100,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi Renja tahun berjalan serta mengacu kepada RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2026. Kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 memuat rencana operasional pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 melalui pelaksanaan 1 (satu) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 2 (dua) Urusan Pemerintahan Pilihan dengan total pagu anggaran Rp. 13.762.404.989,00 (Tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan total pagu Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 adalah Rp. 4.647.370.000,00 (Empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Catatan penting yang patut mendapat perhatian dalam Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 adalah Adanya pemilihan Bupati dan wakil Bupati pada tahun 2025 yang mengharuskan

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan serta mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan, maka kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh aparaturnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 dengan efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
2. Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 merupakan langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2026, dimana selanjutnya Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka wajib melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026 secara berkala, melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan secara berkala;
4. Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Tindak Lanjut atas Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 mencakup:

1. Penyusunan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 dengan mengacu kepada Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2026;
2. Persiapan pelaksanaan Renja hingga pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangka.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Sungailiat, 8 Agustus 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19670504 199403 1 013

LAMPIRAN

VERIFIKASI TARGET SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET 2026 DI RENSTRA PD	TARGET DI P- RENJA PD 2025	TARGET DI RENJA PD 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja		Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kategori /Nilai	76,26	74,75	76,26	74,75
	Perangkat Daerah							
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan pelaporan Kinerja sesuai standar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	25,35	25,62	25,62	25,62
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	11,50	11,17	11,17	11,17
	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	Persen	100	100	100	100
			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	Persen	0	0	0	0
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	100	100	100

	Meningkatnya kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN PD		Indeks	64,16	64,65	64,55	64,65
		Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menggunakan atribut lengkap	Persen	100	100	100	100
			Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	Persen	100	100	100	100
			Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	-	50	-	50
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks	3	4	4	4
	Terlaksananya layanan jasa adminstrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum di Perngkat Daerah	Persen	100	100	100	100
	Terlaksananya Layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100
	Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		Persentase BMD Perangat Daerah dalam kondisi baik	Persen	90	100	100	100
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	Persen	65,00	75	70,00	75,00

2.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah		Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah	Indeks	44,39	74,26	68,19	74,26
	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	Persen	42,58	60,00	56,00	60,00
	Meningkatnya Ketrampilan dan Kompetensi Pencari Kerja	Kegiatan Pelaksanaan berdasarkan Unit kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mengikuti Pelatihan	Persen	29,03	57,14	53,85	57,14
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja Yang ditempatkan	Persen	-	100	-	100,00
	Meningkatnya Informasi lowongan pekerjaan yang diakses masyarakat dan pencari kerja	Kegiatan Pengelolaan Informasi pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan kerja yang diakses pencari kerja	Persen	-	28,00	-	28,00
	Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	Persen	46,5	49,04	47,77	49,04
	Meningkatnya Perusahaan yang mengesahkan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	Persen	86,9	96,25	91,46	96,25

	Terselesainya penyelesaian Kasus Perselisihan HI melalui Perjanjian Bersama	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	62,50	62,50	62,50	62,50
3.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,09	12,69	12,54	12,69
	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi yang direvitalisasi	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00
	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	62,50	87,50	75,00	87,50
	Menstabilkan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	Persen	102,86	100	90,00	100
	Meningkatnya Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota	Kegiatan Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	Persentase Kecukupan Barang Kebutuhan Pokok & Barang penting	Persen	85,00	95	90,00	95,00
	Meningkatnya Standarisasi Perlindungan Konsumen	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	Persen	30,77	43,13	39,29	43,13

	Meningkatnya UTP yang ditera/tera Ulang	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase UTP yang ditera/tera ulang	Persen	130,64	94,39	85,81	65,00
4.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB		Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	24,24	24,62	24,47	24,62
	Meningkatnya IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk pengembangan Produk IKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk pengembangan Produk IKM	Persen	8,08	0,80	1,50	0,80
	Meningkatnya Pelaksanaan Rencana Pembangunan industri Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persen	20,00	30,00	25,00	30,00

Sungailiat, 22 Mei 2025

Mengetahui,

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



D. S. H. SEP SETIAWAN

NIP. 196705041994021013

**JADWAL TENTATIF TAHAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN	PELAKSANA
1	SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja PD Tahun 2026	Minggu I Desember 2024		Bappeda, Seluruh PD, Bagian Hukum dan HAM Setda
2	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026	Minggu I Desember 2024 - Minggu I Februari 2025	Dimulai paling lambat minggu pertama Desember tahun 2024	Seluruh PD
3	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Bappeda	2 Februari 2025		Seluruh PD
4	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	14-25 Januari 2025		Dinpemdes, Desa/Kelurahan
5	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	3-13 Februari 2025	Paling lambat minggu kedua Februari 2025	Bappeda, Kecamatan, PD terkait
6	SE Kepala Daerah tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2026	14 Februari 2025	Paling lambat minggu kedua bulan Februari 2025	Bappeda
7	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	17-28 Februari 2025		Seluruh PD
8	Input Rancangan Renja PD ke SIPD	17 Februari - 7 Maret 2025	Seluruh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda	Input Rancangan Renja PD ke SIPD
9	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	25-27 Februari 2025	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima	Perangkat daerah dikoordinasikan oleh Bappeda
10	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	10-14 Maret 2025		Bappeda dan Seluruh PD
11	Penetapan RKPD Kab. Bangka melalui Perbup	9 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda
12	Surat Sekda kepada Kepala PD tentang Penyusunan Ranhir Renja PD	9 Juli 2025		Bappeda

13	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	10-15 Juli 2025	Paling lambat 1 minggu setelah Perbup RKPD	Seluruh PD
14	Verifikasi Ranhir Renja PD oleh Bappeda dan Perbaikan oleh PD	16-23 Juli 2025	Paling lambat 2 minggu setelah penyampaian oleh PD	Bappeda dan Seluruh PD
15	Reviu Ranhir Renja PD oleh Inspektorat dan Tindak Lanjut oleh PD	24 Juli-5 Agustus 2025		Inspektorat dan Seluruh PD
16	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	6-7 Agustus 2025		Bappeda
17	Penetapan Renja PD melalui Perbup	8 Agustus 2025	Paling lambat 1 bulan setelah penetapan Perbup RKPD	Bappeda, Bagian Hukum dan HAM Setda



BUPATI BANGKA

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.2/ 1308 /BAPPEDA/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
17. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
 - a. mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
 - c. menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
 - a. penanggung Jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan
 - c. sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; dan

d. anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2024

B. BUPATI BANGKA,



M. HARIS AR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 100.3.3.2/1308/BAPPEDA/2024
 TANGGAL : 5 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangka	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Bangka	Anggota
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Bangka	Anggota
13.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ahmad Syahrudin, S.I.P.	Anggota
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sri Yulisafildiana, S.AP	Anggota
15.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Tedy Heryawan, SE	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Sufandi, A.Md	Anggota
17.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan/ Ikhsan Arfani	Anggota

II. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Ketua
3.	Prencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD/Kukuh Nugroho, SAP	Anggota

III. INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

V. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

VI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
9.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

VII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

VIII. DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
8.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekeratriat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

IX. DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekeratris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

X. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

XI. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

XII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
2.	Plt. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
6.	Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Ervin Septiawan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Rizki Amiliasari	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan/ Yusnila Sari, S.Si	Anggota

XIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Pengumpul/Pengolah/Entri Data pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Sulfiana, S.AB	Anggota

XIV. DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaa dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

XV. DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaa dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

XVII. DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sekretariat Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota

XVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

XIX. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai KIR	Anggota
8.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan/Angga Hidayatullah Eza, S.Si	Anggota

XX. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

XXI. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Kepala Bidang Fasilitas Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitas Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

XXII. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

XXIII. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota
7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

XXIV. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota

XXV. DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perikanan	Anggota

XXVI. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

XXVII. KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
6.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXVIII.KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXIX. KECAMATAN MERAawang

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

XXX. KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXI. KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXII. KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII.KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Suharpin	Anggota
11.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Meggi	Anggota
12.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Uci Oktariza	Anggota
13.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Novela Sumalia	Anggota
14.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan/Misleni Indah Purwati	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR

